

EVALUASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PADA PROGRAM KOTAKU DI KELURAHAN PANCOR KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOVIA ARIANA¹⁾, I DEWA MADE ALIT KARYAWAN²⁾

¹⁾ BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur,

²⁾ Program Studi Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mataram

noviaariana56@gmail.com

ABSTRAK

Pentingnya penanganan permukiman kumuh merupakan salah satu tugas yang dihadapi oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten untuk mewujudkan permukiman layak huni melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU adalah program berbasis masyarakat, untuk melakukan kegiatan infrastruktur seperti perbaikan dan pembangunan fisik, ekonomi dan social. Keberhasilan program perlu dipantau kesesuaiannya dengan napa yang direncanakan. Karena itu perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan penyediaan infrastruktur permukiman pada program KOTAKU. Analisis berdasarkan pendekatan kuantitatif melalui studi literatur dari penelitian sebelumnya. Data pendukung didapatkan dari instansi dan lembaga terkait program KOTAKU di Kelurahan Pancor, Kota Selong Kabupaten Lombok Timur. Hasil evaluasi menunjukkan program KOTAKU yang dilaksanakan dengan berbagai kegiatan telah berhasil mencapai target pembangunan infrastruktur sesuai dengan yang direncanakan. Keberhasilan program ditandai dengan perubahan terhadap perilaku kehidupan masyarakat dan lingkungan yang berkualitas, sehingga penanganan permukiman kumuh tercapai.

Kata kunci: *evaluasi KOTAKU, perubahan perilaku, pembangunan infrastruktur, pemukiman kumuh*

ABSTRACT

The importance of handling slum settlements is one of the tasks faced by the Central, Provincial, and Regency Governments to create livable settlements through the Cities Without Slums/ Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Program. The KOTAKU program is a community-based program, to carry out infrastructure activities such as physical, economic, and social improvement and development. The success of the program needs to be monitored for compliance with what is planned. Because of this, it is necessary to evaluate the implementation of settlement infrastructure provision in the KOTAKU program. The analysis is based on a quantitative approach through literature studies from previous studies. Supporting data was obtained from institutions related to the KOTAKU program in Pancor Village, Selong City, East Lombok Regency. The success of the program is shown by changes in the behavior of people's lives and the quality of the environment so that the handling of slum settlements is achieved.

Keywords: *behavior change, evaluation of KOTAKU, infrastructure development, slum settlements*

PENDAHULUAN

Pertambahan penduduk yang disertai perpindahan penduduk yang tinggi dari desa ke kota, menyebabkan peningkatan jumlah infrastruktur permukiman. Sehingga, kawasan dan permukiman kumuh di kota-kota besar menjadi masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat setempat baik dalam bentuk aspek tata ruang, estetika lingkungan. (Rahajuni et al. 2018). Permukiman berupa hunian kota tidak hanya memikirkan kondisi pada saat ini, dan masa depan (Nasution 2019).

Infrastruktur secara substansi dapat diartikan untuk pembangunan permukiman yang lebih baik, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana, yang merupakan salah satu tujuan Program KOTAKU. Namun, sebanyak apapun infrastruktur akan menjadi sia-sia jika tidak ada kesadaran masyarakat untuk merawat, memelihara, dan mengubah perilaku hidupnya kearah bersih dan sehat (Kamil, Ningrum, and Buchori 2021).

Program KOTAKU adalah program berbasis masyarakat, untuk melakukan kegiatan infrastruktur seperti perbaikan dan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial. Harapannya, permukiman bisa terwujud secara fisik, secara

ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan dan secara sosial dapat merubah menjadi perilaku hidup bersih. Tentang Kawasan dan Permukiman yang menjelaskan sistem yang berkesinambungan, satu kesatuan dalam pembinaan, perbaikan, pencegahan pemeliharaan, dan peningkatan kualitas perumahan kumuh serta dalam penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan (Fatjriani and Arifin 2021).

Perumahan juga biasa disebut permukiman atau sebaliknya. Perumahan adalah kumpulan rumah yang dilengkapi prasarana dan sarana lingkungannya. Titik berat pada penyebutan perumahan adalah pada benda-benda fisik, khususnya rumah. Berbeda dengan pemukiman penduduk, yang memberi kesan pada orang atau sekelompok orang yang tinggal dengan perilaku dan pola pikir di dalam lingkungan. Disini tampak bahwa permukiman cenderung pada kesan sesuatu yang hidup (bukan benda mati), namanya manusia. Sehingga permukiman dan perumahan sangat erat hubungannya, yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi satu sama yang lainnya.

Permukiman Kumuh dikatakan tidak memenuhi syarat karena sarana dan prasarananya tidak teratur, seperti ketidakteraturan bangunan, rumah-rumah yang padat penduduknya dan kualitas bangunan yang tidak sesuai. (Kamil, Ningrum, and Buchori 2021). Gambaran umum tentang sikap dan perilaku rendah dalam konteks standar hidup dan pendapatan kelas menengah adalah kumuh, tanda atau cap untuk golongan bawah dikatakan kumuh, yang mapan kepada kelas bawah yang kurang mapan (Budy 2016).

Kabupaten Lombok Timur adalah Kabupaten terbanyak jumlah penduduknya di Nusa Tenggara Barat juga memiliki kawasan padat penduduk dan kumuh. Salah satunya adalah Kelurahan Pancor yang berada dalam kawasan Kota Selong, ibukota Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kelurahan ini merupakan kawasan padat penduduk dan kumuh, akibat terbatasnya ketersediaan infrastruktur.. Pemerintah harus berperan dalam pemenuhan infrastruktur yang merupakan harapan masyarakat seperti: Prasarana air, permukiman yang sehat dan kebutuhan sanitasi.(Atmaja and Mahalli 2015). Pemerintah Lombok Timur mencanangkan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur pada kawasan kumuh di Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong dan dapat mempengaruhi perilaku masyarakat padat penduduk.

Sehubungan dengan pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka studi ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan program dalam pembangunan infrastruktur, berdasarkan rencana dan realisasinya.. Pertambahan penduduk yang disertai perpindahan penduduk yang tinggi dari desa ke kota, menyebabkan peningkatan jumlah infrastruktur permukiman. Sehingga, kawasan dan permukiman kumuh di kota-kota besar menjadi masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat setempat baik dalam bentuk aspek tata ruang, estetika lingkungan.(Rahajuni et al. 2018). Permukiman berupa hunian kota tidak hanya memikirkan kondisi pada saat ini, dan masa depan (Nasution 2019).

Infrastruktur secara substansi dapat diartikan untuk pembangunan permukiman yang lebih baik, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana, yang merupakan salah satu tujuan Program KOTAKU. Namun, sebanyak apapun infrastruktur akan menjadi sia-sia jika tidak ada kesadaran masyarakat untuk merawat, memelihara, dan mengubah perilaku hidupnya kearah bersih dan sehat (Kamil, Ningrum, and Buchori 2021).

Program KOTAKU adalah program berbasis masyarakat, untuk melakukan kegiatan infrastruktur seperti perbaikan dan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial. Harapannya, permukiman bisa terwujud secara fisik, secara ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan dan secara sosial dapat merubah menjadi perilaku hidup bersih. Tentang Kawasan dan Permukiman yang menjelaskan sistem yang berkesinambungan, satu kesatuan dalam pembinaan, perbaikan, pencegahan pemeliharaan, dan peningkatan kualitas perumahan kumuh serta dalam penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan (Fatjriani and Arifin 2021).

Perumahan juga biasa disebut permukiman atau sebaliknya. Perumahan adalah kumpulan rumah yang dilengkapi prasarana dan sarana lingkungannya. Titik berat pada penyebutan perumahan adalah pada benda-benda fisik, khususnya rumah. Berbeda dengan pemukiman penduduk, yang memberi kesan pada orang atau sekelompok orang yang tinggal dengan perilaku dan pola pikir di dalam lingkungan. Disini tampak bahwa permukiman cenderung pada kesan sesuatu yang hidup (bukan benda mati), namanya manusia. Sehingga permukiman dan perumahan sangat erat hubungannya, yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi satu sama yang lainnya.

Permukiman Kumuh dikatakan tidak memenuhi syarat karena sarana dan prasarananya tidak teratur, seperti ketidakteraturan bangunan, rumah-rumah yang padat penduduknya dan kualitas bangunan yang tidak sesuai. (Kamil, Ningrum, and Buchori 2021). Gambaran umum tentang sikap dan perilaku rendah dalam konteks standar hidup dan pendapatan kelas menengah adalah kumuh, tanda atau cap untuk golongan bawah dikatakan kumuh, yang mapan kepada kelas bawah yang kurang mapan (Budy 2016).

Kabupaten Lombok Timur adalah Kabupaten terbanyak jumlah penduduknya di Nusa Tenggara Barat juga memiliki kawasan padat penduduk dan kumuh. Salah satunya adalah Kelurahan Pancor yang berada dalam kawasan Kota Selong, ibukota Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kelurahan ini merupakan kawasan padat penduduk dan kumuh, akibat terbatasnya ketersediaan infrastruktur.. Pemerintah harus berperan dalam pemenuhan infrastruktur yang merupakan harapan masyarakat seperti: Prasarana air, permukiman yang sehat dan kebutuhan sanitasi.(Atmaja and Mahalli 2015). Pemerintah Lombok Timur mencanangkan Program Kota Tanpa

Kumuh (KOTAKU) dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur pada kawasan kumuh di Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong dan dapat mempengaruhi perilaku masyarakat padat penduduk.

Sehubungan dengan pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka studi ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan program dalam pembangunan infrastruktur, berdasarkan rencana dan realisasinya.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yaitu “bagaimana mengevaluasi pelaksanaan penyediaan infrastruktur permukiman pada program kotaku di kelurahan Pancor Kabupaten Lombok Timur ?.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan penyediaan infrastruktur permukiman pada program kotaku di kelurahan Pancor Kabupaten Lombok Timur.

METODE PENELITIAN

Evaluasi Pelaksanaan Program KOTAKU pada studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif (Handika and Yusran 2020) dan studi literatur dari penelitian sebelumnya. Data yang dikumpulkan didapatkan dari instansi dan lembaga terkait dalam program KOTAKU, kemudian dilakukan kompilasi dan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Rencana dan Realisasi

Data rencana dan realisasi pembangunan infrastruktur dan dokumentasi sebelum dan sesudah Program KOTAKU, dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kegiatan KOTAKU Skala Kawasan

No	Kegiatan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Satuan	Progres (%)	Keterangan
I	Umum, keselamatan kerja & Covid					
1	Persiapan	1	1	Ls	100	
2	Covid	1	1	Ls	100	
II	Utama					
1	Saluran Drainase Sangkon	1.650	1.650	M	99,69	Jaring Sampah
2	Crosing Aspal	45	45	M	97,72	Ruas Dewi Sartika
3	Jalan Lingkungan/ Paving	2.623	2.623	M	100	
4	Pedestrian	1.200	1.200	M	100	
5	Jalan Lingkungan Sangkon	1000	1000	M	100	
6	Ruang Terbuka Publik Meteorologi	134,34	134,34	M2	100	
7	Perpipaan	7.699	7.699	M	100	
8	Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal & MCK Umum	7	7	Unit	100	
9	Ruang Terbuka Publik Pancor	1.760	1.760	M2	100	

Sumber data : Koordinator KOTAKU Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021

Infrastruktur yang Dibangun pada Program KOTAKU dan Manfaatnya

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai melalui Program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) yaitu kota layak huni, produktif dan berkelanjutan, maka dilakukan serangkaian kegiatan di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kelurahan/desa. Dua kegiatan yang dilakukan yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan, melalui pendekatan partisipatif. Pendekatan tersebut mempertemukan perencanaan makro (top-down) dengan perencanaan mikro (bottom-up) (Anonim 2018), termasuk pembangunan infrastruktur.

Infrastruktur yang dibangun pada Program KOTAKU sangat nyata manfaatnya, yang dirasakan para penerima manfaat/ sasaran. Gambar 1, menunjukkan adalah realisasi infrastruktur saluran drainase. Manfaat yang dirasakan adalah air di saluran drainase menjadi bersih dan tidak ada yg membuang sampah. Disamping itu saluran bisa dimanfaatkan sebagai tempat memelihara ikan. Program KOTAKU dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan seperti dari aspek perencanaan dilakukan sosialisasi, mengadakan pelatihan-pelatihan, hingga pelaksanaan pembangunan infrastrukturnya (Handika and Yusran 2020).

Pada kegiatan jalan lingkungan, manfaat yang di rasakan adalah jalan yang bisa memberikan akses menuju jalan kabupaten, provinsi dan jalan negara dan jalan-jalan alternative. Infrastruktur jalan lingkungan dapat dilihat dalam Gambar 2.



Gambar 1. Pembangunan infrastruktur saluran drainase sangkon



Gambar 2. Infrastruktur jalan lingkungan



Gambar 3. Kegiatan penyediaan pedestrian



Gambar 4. Kegiatan penyediaan RTP Meteorologi



Gambar 5. Kegiatan penyediaan perpipaan

Kegiatan pedestrian (Gambar 3) memberi manfaat yang dirasakan adalah pejalan kaki yang nyaman, terutama bagi penyandang disabilitas. Pada kegiatan RTP Meteorologi (Gambar 4), manfaat yang dirasakan masyarakat lingkungan setempat adalah bisa menikmati ruang terbuka hijau yang sebelumnya tidak ada, seperti terlihat pada Gambar 4. Pada kegiatan perpipaan (Gambar 5) yang dirasakan adalah, adanya sambungan rumah untuk air bersih, sehingga tidak lagi masyarakat mandi, cuci, kakus di sungai.

Pada kegiatan IPAL Komunal (Gambar 6) dan MCK umum (Gambar 7) yang dirasakan adalah, lingkungan menjadi bersih, dan saluran drainase menjadi bersih dan tidak tercemar. Pada kegiatan RTP Pancor (Gambar 8) yang dirasakan adalah, masyarakat sekitar dan pendatang dapat menikmati ruang terbuka hijau, dan menjadi taman Masjid.



Gambar 6. Kegiatan IPAL Komunal



Gambar 7. Kegiatan MCK umum



Gambar 8. Kegiatan RTP Pancor.

Capaian Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Program KOTAKU telah berhasil membangun infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tersebut meliputi: saluran drainase sangkon, infrastruktur jalan lingkungan, kegiatan penyediaan pedestrian, kegiatan

penyediaan RTP Meteorologi, kegiatan penyediaan perpipaan, kegiatan IPAL Komunal, Kegiatan MCK umum, Kegiatan RTP Pancor.

Program KOTAKU menurunkan luas permukiman kumuh dengan mewujudkan permukiman yang layak huni. Selain itu, upaya meningkatkan penghasilan masyarakat, melalui upaya perubahan perilaku bersih dan sehat dari masyarakat. Tempat atau lingkungan yang bersih dan nyaman didapatkan dengan upaya dari masyarakat untuk bisa menerima perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah di daerah tersebut. Serta mengajak masyarakat untuk bisa mendukung jalannya program pembenahan yang dilakukan di Kelurahan Pancor Kabupaten Lombok Timur. Pihak Kelurahan meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan ditambah dengan pembinaan langsung untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Hal ini penting mengingat peran Pemerintah pada Program KOTAKU untuk terus melakukan pembenahan bagi masyarakat agar masyarakat mendapat lingkungan yang nyaman dan bersih. Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni diantaranya melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) (Anonim 2016).

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam perencanaan dan implementasinya. Sistem yang terpadu akan ditangani Pemerintah Daerah bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat.(Anzila and Wijaya 2018). Berani berubah dalam KOTAKU tidak cukup hanya melakukan proses penyadaran di level masyarakat, tetapi juga semua pihak, baik pemerintah sebagai Pembina maupun pelaku ditingkat Pusat dan Daerah. Kawasan kumuh seluas 38,431 Ha dilakukan penanganan untuk mengurangi kekumuhan. Perubahan sarana pasca KOTAKU dari tidak tertata, kotor menjadi rapi dan bersih dan perilaku masyarakat yang berubah. Program KOTAKU sangat berpengaruh, yaitu lingkungan menjadi sehat dan infrastruktur yang bersih dan terpelihara, seperti jamban yang bersih, pembuangan limbah yang layak dan pengelolaan sampah yang baik dengan cara membuang sampah pada tempatnya (Anonim 2016).

Faktor-faktor penghambat dalam implementasi program ditempat lain (Wulandari, Syahrani, and Paselle 2019), pada program KOTAKU di Kelurahan Pancor Kabupaten Lombok Timur dapat di atasi sehingga sasaran program dapat dicapai. Koordinasi antar instansi pelaksana tingkat kabupaten/ kota dengan kelurahan serta monitoring yang intensif untuk memastikan ketepatan kualitas bantuan dan partisipasi masyarakat. Program KOTAKU terlihat hasilnya, dimana lingkungan menjadi bersih, meningkatkan ke arifan local, perilaku masyarakat yang menjadi lebih baik dan lebih bersih, kerukunan dan kerjasama antar masyarakat terjalin erat, partisipasi masyarakat yang menumbuhkan kepercayaan dan kemanfaatan. Program KOTAKU menunjukkan pengaruh besar dalam perubahan fisik atau perilaku masyarakat. Perubahan fungsi bangunan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah kota. Indikasi perkembangan perumahan dan wilayah sangat berpengaruh satu sama lain. Secara fisik bangunan, perkembangan perumahan sangat terlihat, demikian juga dengan perubahan perilaku masyarakat.

PENUTUP

Simpulan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Program KOTAKU di Kelurahan Pancor, Kota Selong telah berhasil mencapai target pembangunan infrastruktur sesuai dengan yang direncanakan. Keberhasilan program dapat dirasakan penerima program, ditandai dengan perubahan terhadap perilaku kehidupan masyarakat dan lingkungan yang semula kumuh menjadi bersih dan tertata rapi.

Saran

Melihat hasil pelaksanaan program ini, maka perlu diimplementasikan pada kawasan kumuh lainnya. Sehingga, disarankan untuk menyiapkan data untuk pelaksanaan program di kawasan kumuh lainnya, sebagai upaya pengurangan kawasan kumuh dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2016). Laporan Evaluasi Midterm *Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)*. <http://kotaku.pu.go.id/view/6900/surat-edaran-djck-no-40-se-dc-2016-tentang-pedoman-umum-program-kotaku>.
- Anonim. (2018). *Program KOTAKU Petunjuk Pelaksanaan Program Kotaku Tingkat Kelurahan /Desa/Kota*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, KemenPUPR. [https://kotaku.pu.go.id/files/Media/Pustaka/POS/Petunjuk pelaksanaan Program Kotaku Tingkat Kelurahan.pdf](https://kotaku.pu.go.id/files/Media/Pustaka/POS/Petunjuk_pelaksanaan_Program_Kotaku_Tingkat_Kelurahan.pdf).
- Anzila, Isna, and I Nyoman Suluh Wijaya. (2018). "MALANG (Studi Kasus Di Kelurahan Kotalama Dan Kelurahan

- Sukun).” 11: 101–12.
- Atmaja, Harry Kurniadi, and Kasyful Mahalli. (2015). “Pengaruh Peningkatan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Sibolga.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 3(4): 1–18.
- Budy, Andas. (2016). “Penataan Kawasan Pemukiman Kumuh Kelurahan Tamamaung Kota Makassar.” : 85–89.
- Fatjriani, M., and Jauhar Arifin. 2021. “Evaluasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong (Studi Tentang Pembuatan Drainase Ditinjau Pada Tahap Pelaksanaan).” *Japb* 4(1): 217–28.
- Handika, Vira, and Rahmadani Yusran. (2020). “Implementasi Program Kotaku Dalam Upaya Mengatasi Pemukiman Kumuh Di Kabupaten Lima Puluh Kota.” *Journal of Civic Education* 3(3).
- Kamil, Rozi Nauval, Sinta Ningrum, and Rd Ahmad Buchori. (2021). “Pengendalian Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Oleh Satuan Kerja Kota Di Kota Bandung.” *Jurnal Administrasi Negara* 13(1): 36–40.
- Nasution, Aulia Muflih. (2019). “Analisis Permasalahan Perumahan Dan Permukiman Di Kota Medan.” (*Journal of Architecture and Urbanism Research* 3(1): 27–46.
- Rahajuni, Dijan, Suprpto, Sri Lestari, and Lilis Siti Badriah. (2018). “Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Pada Masyarakat Miskin Di Kabupaten Banyumas.” *Jurnal Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers* 8(14–15): 118–27. <http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article/view/634>.
- Wulandari, Iska Aprilya, H Syahrani, and Enos Paselle. (2019). “Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.” *eJournal Administrasi Negara* 7(4): 9422–36.